

BAB 4 ANALISIS ISU ISU STRATEGIS

Analisa isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal sampai dengan tahun 2011. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan.

Penentuan isu-isu strategis tersebut yakni dengan menggali permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada dengan menggunakan metode simulasi dinamik sebab-akibat dengan mencari keterkaitan masing-masing isu satu sama lainnya. Kemudian masing-masing isu tersebut dianalisis apakah sebagai penyebab isu yang lain atau menjadi akibat dari isu tersebut. Metode *brainstorming* digunakan dalam analisis sebab-akibat tersebut.

4.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan dan tantangan tiap urusan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Demak dalam rangka pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain:

- a) Angka partisipasi TK secara keseluruhan masih sangat rendah, yaitu APK hanya sebesar 49%, APM 37%, dan APS 71%. Upaya peningkatan APK TK dilakukan dengan menambah satuan pendidikan yang dilakukan oleh dinas dan Masyarakat.
- b) Masih ada 7 sekolah yang mempunyai APtS di atas 1%, meliputi SMA = 1 sekolah, SMK = 2 sekolah, dan MA = 4 sekolah. Jumlah siswa keseluruhan 236 siswa.
- c) Ruang kelas SD yang Rusak Ringan dan Berat menjadikan kualitas layanan pendidikan menjadi rendah.

- d) Rata - rata APtS masih di atas 1%.
- e) Masih rendahnya APK Paud di Kabupaten Demak yaitu sebesar 45%.
- f) Masih rendahnya peran pemerintah Kabupaten Demak di dalam penyelenggaraan PAUD Non Formal terbukti belum adanya Paud Unggulan.
- g) Kondisi ruang belajar Kejar rusak ringan = 28.88%, rusak berat = 25.04%.
- h) Angka Lulusan Kejar masih rendah.
- i) Kualifikasi pendidikan guru SD setara S1/D4 masih 17%, kualifikasi pendidikan guru TK/RA setara S1/D4 masih 6%.
- j) Masih 28% guru SMP Kabupaten Demak belum berkualifikasi S1/D4.
- k) Rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Demak.

2. Urusan Kesehatan

- a) Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi.
- b) Angka kesakitan demam berdarah masih tinggi, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, Adanya kasus flu burung, leptospirosis serta adanya ancaman pandemi flu burung. Penyakit-penyakit menular/infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti diabetes melitus (DM), kardiovaskular dan kanker (keganasan) cenderung meningkat.
- c) Cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah sehat rendah.
- d) Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak sudah baik tetapi masih dijumpai adanya kematian bayi dan ibu, serta prevalensi gizi masih lebih tinggi dari angka rata-rata Kabupaten Demak.
- e) Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu, belum optimal. Kondisi ini antara lain disebabkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan yang belum memadai, seperti belum semua desa memiliki PKD, belum

semua rumah sakit memenuhi standar tenaga khusus dokter dan dokter spesialis sesuai dengan kelas rumah sakit, serta ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang belum memadai.

3. Urusan Pekerjaan Umum

- a) Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah disebabkan usia konstruksi yang telah melebihi standar;
- b) Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan;
- c) Mulai menurunnya kondisi prasarana drainase; Drainase yang dalam kondisi tersumbat 57,78%;
- d) Belum memadainya sarana penerangan jalan umum di desa/kota;
- e) Belum memadainya sarana-prasarana pemadam kebakaran;
- f) Infrastruktur jalan kabupaten yang kondisinya masih perlu penanganan / perbaikan (43,88%);
- g) Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat, baik untuk irigasi pertanian atau air minum;
- h) Menurunnya kemampuan penyediaan air, disebabkan menurunnya area resapan air dan meningkatnya sedimentasi pada saluran irigasi; Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Demak 0,501; Luas irigasi yang membutuhkan penanganan/perbaikan (49%)
- i) Belum memadainya penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS); Rasio TPS per satuan penduduk 0,193;
- j) Masih tingginya rasio permukiman tidak layak huni (0,53);

4. Urusan Perumahan

- a) Masih banyaknya rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih (82,69%);
- b) Masih banyaknya rumah tangga yang belum dapat memanfaatkan aliran listrik (54,68%);
- c) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat;
- d) Pelayanan air bersih belum sepenuhnya optimal;

- e) Penggunaan jamban terbuka relatif masih tinggi;

5. Urusan Penataan Ruang

- a. RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2036 perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) dan rencana pembangunan kawasan, berikut koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
- b. Perlu penyesuaian terhadap perubahan-perubahan ruang
- c. Masih rendahnya kesadaran para pelaksana pembangunan dalam pemanfaatan rencana tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
- d. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
- e. Rendahnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- f. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Perencanaan Pembangunan:

- a) Belum optimalnya dukungan data dan informasi sektor-sektor pembangunan dalam rangka analisa, evaluasi dan pengendalian arah kebijakan pembangunan daerah
- b) Dokumen rencana pembangunan daerah belum didukung dengan data, informasi yang berkualitas;
- c) Masih rendahnya kapasitas/kemampuan teknis aparatur perencanaan;
- d) Perlunya penyelenggaraan rencana pembangunan daerah secara partisipatif dan sinergitas/keselarasan antar doumen rencana pembangunan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- e) Masih rendahnya dukungan rencana pembangunan ekonomi terhadap rencana pembangunan daerah;
- f) Masih rendahnya dukungan rencana pembangunan pemerintahan dan sosial budaya terhadap rencana pembangunan daerah;
- g) Masih rendahnya kerjasama antar daerah, daerah dengan dunia usaha/lembaga dalam penyediaan infrastruktur ekonomi dan sosial;

- h) Perlunya penyesuaian rencana prasarana wilayah dan sumberdaya alam dengan arah kebijakan tata ruang dan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- i) Perlunya arahan kebijakan pengembangan kawasan-kawasan perbatasan sebagai tindaklanjut peraturan tata ruang yang baru;
- j) Belum tersedianya arah kebijakan pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh, utamanya koridor jalan arteri primer, kawasan wisata, kawasan pelabuhan perikanan.
- k) Belum tersedianya arahan rencana tindak pengembangan perkotaan.

7. Urusan Perhubungan

- a) Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung terwujudnya kenyamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan rendahnya penyediaan infrastruktur transportasi khususnya pelayanan angkutan di Terminal yang ada sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai terminal Tipe B.
- b) Masih rendahnya penyediaan infrastruktur jaringan layanan akses informasi dan komunikasi dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan e-government.
- c) Masih kurangnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan bidang transportasi, komunikasi dan informasi.
- d) Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
- e) Belum tersedianya pedoman pelaksanaan operasional penyelenggaraan POSTEL.
- f) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas

8. Urusan Lingkungan Hidup

- a) Adanya kecenderungan peningkatan tingkat pencemaran lingkungan hidup.
- b) Degradasi ekosistem dan lingkungan.
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

- d) Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- e) Terjadinya stagnasi dalam penanganan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- f) Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif, efisien, bahkan bernilai ekonomis;
- g) Kecenderungan menyempitnya lahan ruang hijau terbuka.

9. Urusan Pertanahan

- a. Belum optimalnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. Masih sering terjadinya konflik-konflik pertanahan;
- c. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan aset pemerintah daerah/desa;
- d. Tingginya konversi/alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. Belum optimalnya penerapan e-KTP sebagai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana harapan masyarakat.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam peningkatan kesetaraan gender, tetapi kualitas hidup dan peran perempuan belum optimal ditunjukkan dengan lambatnya peningkatan nilai IDG dan IPG setiap tahunnya, antara lain disebabkan:

- a. Masih adanya kseenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan sumberdaya, terutama bidang politik, jabatan publik dan ekonomi;
- b. Belum optimalnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- c. Rentannya kelompok perempuan terhadap dampak krisis ekonomi, konflik sosial dan terjadinya penyakit;

- d. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep, isu gender, serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam perlindungan anak antara lain:

- a. Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya;
- b. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak;
- c. Masih rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a) Rendahnya partisipasi pria dalam program KB/KR. (1,79 %) dan masih tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terlayani program KB / *Umneet need* (12 %)
- b) Masih tingginya keluarga keluarga pra sejahtera dan KS I alasan ekonomi (68 %)
- c) Kurangnya partisipasi Ibu (Keluarga) dalam kegiatan-kegiatan bina keluarga sejahtera.
- d) Belum mantapnya bentuk/pola pemberdayaan masyarakat.
- e) Kurangnya akses pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.

13. Sosial

Lingkup Permasalahan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a) Kemiskinan
- b) Keterlantaran
- c) Kecacatan
- d) Keterpencilan
- e) Ketunaan Sosial dan Penyimpangan perilaku
- f) Korban Bencana ; dan/atau
- g) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

14. Urusan Ketenagakerjaan

- a. Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja;

- b. Belum memadainya ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, sehingga berakibat pada rendahnya posisi tawar tenaga kerja;
- c. Terbatasnya akses informasi pasar kerja, baik domestik maupun luar negeri;
- d. Tidak berimbangny jumlah pencari kerja baru dengan kesempatan kerja yang ada, berakibat tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi (5,49%);
- e. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan lembaga ketenagkerjaan.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Demak berkaitan dengan pembangunan di bidang koperasi dan UKM di antaranya:

- a. Penciptaan iklim usaha UKM yang makin kondusif dan berdaya saing;
- b. Rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pelaku UKM;
- c. Belum optimalnya upaya pengembangan UKM yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*);
- d. Belum optimalnya peran koperasi dan UKM sebagai soko guru perekonomian daerah;
- e. Masih rendahnya produktifitas koperasi dan UKM di Kabupaten Demak;
- f. Lemahnya akses UMKM terhadap Sumber daya produktif baik permodalan, teknologi dan informasi.

16. Urusan Penanaman Modal

Pembangunan investasi di Kabupaten Demak masih menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya:

- a) Masih rendahnya promosi dan kerjasama investasi;
- b) Perlunya penciptaan iklim usaha yang mendukung investasi;
- c) Tingginya aspektasi regulasi dan pelayanan perijinan yang pro-investasi;

- d) Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung investasi;
- e) Belum optimalnya penyiapan potensi sumberdaya daerah yang dapat menarik.

17. Urusan Kebudayaan

- a) Belum optimalnya Promosi Budaya Daerah ;
- b) Belum optimalnya pembinaan, perlindungan dan pelestarian peninggalan sejarah dan benda purbakala (BCB) atau Benda Cagar Budaya ;
- c) Belum optimalnya pembinaan, perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya dan kesenian daerah.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda masih dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, yang ditandai antara lain:

- g. Masih terbatasnya peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan (*agent of change*);
- h. Masih adanya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zatk Adiktif), serta penularan HIV/AIDS di kalangan pemuda;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15 tahun ke atas yang relatif masih tinggi;
- j. Terbatasnya kemampuan kewirausahaan dan kecakapan hidup (*lifes kills*) di kalangan pemuda;

Pembangunan olahraga dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya budaya dan prestasi olahraga, yang ditandai antara lain:

- a. Ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana keolahragaan masih terbatas.
- b. Ruang terbuka untuk olahraga masih terbatas;
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah;
- d. Jumlah dan kualitas SDM keolahragaan masih rendah;
- e. Upaya pembibitan atlet unggulan daerah belum optimal;

- f. Apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi masih rendah.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri:

- a) Rendahnya tingkat partisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis di Kabupaten Demak (64,82%);
- b) Masih danya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- c) Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Demak.
- d) Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;
- e) Belum memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- f) Belum optimalnya sumber daya penanganan tindak darurat bencana;

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

- a) Tempat penyimpanan arsip produk hukum yang kurang memadai
- b) Belum ada arsip digital yang berfungsi sebagai soft copy dari seluruh produk hukum yang ada agar produk-produk hukum tersebut mudah disajikan dan menghindari kehilangan berkas
- c) Perlu disediakan ruangan publik yang berfungsi sebagai tempat/media komunikasi dan penyampaian formasi secara timbal balik antara para wakil rakyat dengan masyarakat maupun para wartawan
- d) SDM yang belum memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna mendukung kinerja para anggota DPRD
- e) Sarana administrasi yang belum mencukupi baik berupa perangkat keras maupun lunak yang akan berfungsi menciptakan produk hukum atas hasil pembahasan dalam sidang-sidang yang dilaksanakan
- f) Minimnya sarana informasi bagi para anggota Dewan agar mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, seperti disediakan tv, koran maupun jaringan internet.

- g) Rendahnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah.

Keuangan daerah merupakan salah satu keterbatasan utama dalam melaksanakan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Demikian halnya dengan di Kabupaten Demak dimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja daerah masih dibawah 10 % total belanja APBD. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Demak masih sangat terbatas dalam membiayai pembangunan, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

- h) Kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak negatif pada kondisi keuangan daerah. Kebijakan tersebut antara lain yaitu kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akan tetapi tidak disertai dengan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah, sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tidak cukup untuk membayar belanja gaji pegawai. Dampak selanjutnya adalah anggaran pembangunan untuk masyarakat Demak akan semakin berkurang karena APBD Kabupaten Demak lebih banyak terserap untuk membiayai belanja pegawai.

- i) Rendahnya potensi sumber daya alam.

Wilayah Kabupaten Demak yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, miskin potensi sumber daya alam, baik berupa sumber daya alam pertambangan minyak bumi, batu bara, kehutanan maupun galian tambang lainnya. Sehingga menyebabkan tidak adanya kemungkinan penggalan potensi PAD dari sumber daya alam.

- j) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, yang mengakibatkan kurang maksimalnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- k) Adanya mutasi atau rolling kepegawaian, khususnya pada staf pengelola barang inventaris dan keuangan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah disamping itu butuh waktu relative lama untuk mengkader staf pengelola barang inventaris dan keuangan yang baru

- a) Belum terkoordinasikannya secara nasional laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh semua departemen dan LPND.
- b) Belum terpadunya program pengawasan untuk kegiatan-kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan antara Inspektorat Kabupaten Demak dengan Inspektorat Provinsi dan BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Implikasinya adalah terlaksananya pengawasan secara bertubi-tubi.
- c) Masih kurangnya kompetensi pegawai baik dari segi knowledge maupun skill sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diembannya.
- d) Pemberian kenaikan pangkat/golongan belum menggambarkan adanya peningkatan kompetensi sehingga diperlukan kejelasan dalam pelaksanaan tugas PNS sehari-hari dan kenaikan pangkat dengan peningkatan kompetensinya yang didasarkan pada penilaian hasil kerja.
- e) Para PNS yang akan memasuki masa pesiun belum sadar akan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan administrasi pensiun maupun penerimaan Tunjangan Hari Tua (THT) agar lancar dalam pengurusannya sehingga diperlukan pemberian informasi/pengertian kepada masing-masing PNS yang bersangkutan.
- f) Kedisiplinan PNS masih rendah, rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai selain diakibatkan oleh pegawai yang tidak disiplin, juga diakibatkan oleh masih belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan dari pimpinan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan dan pembinaan pimpinan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penerapan disiplin pegawai terutama dalam hal masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sangat dibutuhkan. Kedisiplinan PNS yang masih rendah akan berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan

- program dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun dan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
- g) Pemahaman tentang peraturan disiplin oleh pejabat struktural masih rendah, sehingga perlu dilakukan adanya penyebarluasan dan sosialisasi peraturan tentang disiplin PNS secara berkelanjutan.
 - h) Penilaian kinerja dari atasan pada bawahan belum objektif.
 - i) Belum terpenuhinya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan bagi PNS yang menduduki pejabat struktural sehingga diperlukan Diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan.
 - j) Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan teknis maupun fungsional PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional untuk diikuti yang bersangkutan;
 - k) Masih rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki PNS sehingga perlu memberi kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi melalui program ijin belajar maupun tugas belajar;
 - l) Belum tercapainya standar kompetensi jabatan baik struktural maupun fungsional umum yang tepat, akurat dan terukur, sehingga diperlukan aturan tetap dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur pedoman standar kompetensi di lingkungan Kabupaten Demak.
 - m) Belum terpenuhinya pejabat fungsional tertentu dalam menunjang kelancaran tugas pokok SKPD, sehingga perlu penambahan formasi dan pengangkatan pejabat fungsional.

21. Ketahanan Pangan

- a. Belum optimalnya penguatan cadangan pangan di daerah, ditandai masih sedikitnya jumlah desa mandiri pangan (5 desa), lumbung pangan (23 unit),
- b. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan di daerah (39,56%);

- c. Belum optimalnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- d. Belum optimalnya pengembangan intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan di daerah;
- e. Belum berkembangnya model distribusi pangan yang efisien;
- f. Belum berkembangnya sistem informasi pasar, mutu, dan keamanan pangan;
- g. Belum berkembangnya pengelolaan sumber pangan alternatif;
- h. Belum berkembangnya penelitian dan pengembangan teknologi pangan.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya peran lembaga dan organisasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
- b. Belum berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan;
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat membangun desa;
- d. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa, terutama di bidang pembangunan kawasan perdesaan, pengelolaan keuangan desa, dan manajemen pemerintahan desa;
- e. Masih rendahnya peran kelompok perempuan dalam pembangunan desa, terutama dalam pengembangan usaha ekonomi produktif yang mendukung pendapatan keluarga.

23. Urusan Statistik

Masih rendahnya dukungan ketersediaan dan kualitas data/informasi statistik bagi penyusunan kebijakan daerah.

24. Urusan Kearsipan

- a. Belum memadainya sistem administrasi kearsipan daerah;
- b. Perlunya penyelamatan, pemanfaatan, dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- c. Belum memadainya sarana-prasarana kearsipan daerah;
- d. Belum optimalnya pelayanan informasi tentang arsip daerah.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Belum memadainya infrastruktur jaringan layanan akses informasi dan komunikasi dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan *e-government*.

- b. Belum berkembangnya pengkajian dan penelitian (*research*) di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur dalam bidang komunikasi dan informatika;
- d. Belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah, informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penyuluhan kepada masyarakat.

26. Perpustakaan

- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca di kalangan masyarakat;
- b. Masih terbatasnya ketersediaan bahan pustaka dan prasarana perpustakaan di daerah.

25. Urusan Pertanian

Permasalahan :

- a) Rendahnya keterampilan teknis bagi aparat;
- b) Fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai;
- c) Kurangnya tenaga teknis di tingkat lapang. Berkurangnya lahan produktif;
- d) Diberlakukannya standar ISO diberbagai bidang;
- e) Terjadinya anomali iklim.
- f) Globalisasi pasar bebas.

26. Urusan Kehutanan

- a. Rendahnya sumberdaya hutan di Kabupaten Demak;
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan;

27. Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Kabupaten Demak tidak memiliki sumberdaya energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol. PLTS, PLTD, PLTMH;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral;
- c. Subsidi BBM belum tepat sasaran;
- d. Masih rendahnya penelitian (*research*) dan investasi di bidang energi dan sumberdaya mineral;
- e. Banyaknya pembuatan sumur bor yang mengurangi fungsi dan ketersediaan air bawah tanah.

- f. Terbatasnya kapasitas SDM bidang energi dan sumberdaya mineral;

28. Urusan Pariwisata

- g. Belum optimalnya promosi yang dilakukan baik dalam maupun luar negeri, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja para wisatawan masih relatif kecil;
- h. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola obyek wisata dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun pelaku usaha pariwisata, serta kurangnya pemandu wisata dilingkungan obyek wisata.
- i. Belum optimalnya kemitraan, jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata di daerah antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;

29. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Rendahnya kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat, utamanya masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b) Menurunnya produksi perikanan tangkap akibat dari :
- c) Belum sepenuhnya petani pembudidaya menguasai dan menerapkan cara berbudidaya ikan yang baik (CBIB)
- d) Menurunnya kualitas/mutu benih yang didatangkan dari luar Demak
- e) Belum optimalnya sarana prasarana pendukung perikanan tangkap
- f) Sedimentasi yang terjadi di muara sungai mengganggu lalu lintas perahu nelayan. Sedangkan sedimentasi pada saluran tambak/afvour mengganggu system pengairan
- g) Rendahnya mutu hasil pengolahan produk kelautan dan perikanan
- h) Masih banyaknya usaha pengolahan ikan yang belum berijin
- i) Belum optimalnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- j) Kurangnya kesadaran akan gemar makan ikan mengakibatkan kurangnya penyerapan produk perikanan
- k) Kurang akses pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan

- l) Kurangnya akses permodalan
- m) Abrasi (pengikisan wilayah pesisir oleh air laut) menyebabkan hilangnya lahan tambak serta lahan perumahan penduduk/nelayan
- c) Pencemaran wilayah pesisir

30. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Menurunnya produksi perikanan tangkap akibat dari :
 - 1) Penggunaan teknik serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan menyebabkan *over fishing*
 - 2) Keterbatasan perahu nelayan
 - 3) Belum optimalnya sarana prasarana pendukung perikanan tangkap.
- b) Kurangnya kesejahteraan Nelayan, Petani Ikan, Pengolah, maupun Pemasar di bidang Kelautan dan perikanan
- c) Kerusakan wilayah pesisir akibat abrasi (pengikisan wilayah pesisir oleh air laut) dan pencemaran.

Abrasi menyebabkan hilangnya lahan tambak serta lahan perumahan penduduk/nelayan
- d) *Over fishing* di Pantura Jawa menyebabkan terjadinya penurunan produksi di Pantura Jawa.
- e) Adanya Program Gemar Ikan yang digalakkan secara nasional
- f) Belum adanya pelabuhan yang representative dan fasilitas docking kapal
- g) Perlunya diversifikasi produk perikanan budidaya dan produk olahan perikanan untuk mengatasi kejenuhan pasar.

31. Urusan Perdagangan

- a. Perlunya perlindungan konsumen dan penciptaan iklim perdagangan yang kondusif;
- b. Masih rendahnya kemampuan ekspor produksi daerah;
- c. Minimnya sarana dan prasarana perdagangan rakyat di Kabupaten Demak khususnya tidak adanya kenaikan jumlah

Toko, kios, dan los pasar yang dibangun (Pasca kebakaran Pasar Bintoro tahun 2006);

- d. Perlunya penertiban dan pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan yang semakin bertambah jumlahnya.

32. Urusan Perindustrian

- a. Belum optimalnya penguatan kemampuan industri berbasis teknologi dan inovasi teknologi industri di kalangan IKM;
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan IKM dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat;
- c. Keterbatasan kompetensi, etos kerja dan profesionalitas sumber daya industri;
- d. Lemahnya struktur industri, terutama keterkaitan industri hulu dan hilir.

33. Urusan Ketransmigrasian

- a. Belum optimalnya pengembangan wilayah transmigrasi
- b. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Berdasarkan dari permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten seperti yang telah diuraikan diatas ditambah dari isu dari internasional, nasional dan regional maka isu strategis Pemerintah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang baik akan lebih mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Demak. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja (*better performance*) lembaga dan aparatur pemerintah daerah akan lebih menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat; dan dengan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

2. Sumberdaya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Sumberdaya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Demak. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan aktivitas manusia. Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan Kabupaten Demak. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator tercapai atau tidaknya progam-program pembagunan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi sangat urgan untuk ditingkatkan kinerjanya.

3. Ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan pariwisata perlu ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam menopang ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi daerah, sehingga secara simultan dapat mendorong laju pertumbuhanekonomi daerah.

4. Investasi dan lapangan kerja

Investasi merupakan salah satu faktor (*push factor*) bagi berkembangnya perekonomian suatu pemerintahan (daerah). Apabila investasi yang masuk ke daerah tinggi, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya investasi di daerah, baik dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) akan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi jumlah penganggur dan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kualitas Kehidupan Beragama

Isu kualitas kehidupan beragama masyarakat merupakan isu yang mendasar dalam kerangka pembangunan moral dan spiritual di daerah. Hal tersebut terkait dengan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spritual dalam dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

6. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian pertumbuhan penduduk

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai kemajuan pembangunan yang responsif gender perlu ditingkatkan kinerjanya yang ditandai dengan meningkatnya IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Selain itu perlindungan anak dari berbagai perlakuan salah dan eksplorasi anak harus dilakukan; anak harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun pasikis, sehingga dapat diharapkan menjadi asset sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, agar keberhasilan pembangunan dapat secara efektif dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, maka perlu adanya pengendalian pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

7. Potensi pemuda, olahraga dan seni budaya

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial (*social control*), dan agen perubahan (*agent of change*) dalam berbagai aspek pembangunan. Sedang pembangunan keolahragaan memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, sportivitas, disiplin, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan daerah dan negara. Selanjutnya pembangunan di bidang seni budaya dapat lebih memperkuat jati diri dan karakter bangsa.

8. Infrastruktur ekonomi dan sosial

Bidang sarana-prasarana (infrastruktur) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat.

Peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan, jembatan, irigasi dan pasar memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang memungkinkan orang, barang dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, serta mendorong produksi dan distribusi komoditi ekonomi, sehingga sangat mendukung daya saing ekonomi daerah. Selain itu penyediaan air bersih dan pembangunan sanitasi yang memadai sangat diperlukan mengingat wilayah Kabupaten Demak masih sangat potensial rawan kekeringan;

Demikian pula peningkatan kualitas infrastruktur sosial, baik yang dikelola oleh pemerintah seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas; serta prasarana sosial lain yang melibatkan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar hidupnya.

9. Pembangunan pedesaan dan pengembangan kawasan strategis

Dalam rangka mengurangi kesenjangan pertumbuhan desa-kota dan meningkatkan keberdayaan masyarakat desa perlu dipercepat upaya pembangunan perdesaan, terutama dalam penyediaan sarana prasarana perdesaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, pengembangan kawasan strategis yang meliputi kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer (Sayung, Karangtengah, Demak, Gajah, Karanganyar), kawasan wisata religi Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga, kawasan wisata bahari Surodadi Kec. Sayung, Kawasan Pelabuhan Perikanan Morodemak Kec. Bonang, kawasan perbatasan (Kec. Mranggen, Karangawen, Mijen, Karanganyar), kawasan rawan abrasi dan rob (Kec. Sayung, Karangtengah, Bonang), dan kawasan sedimentasi (Kec. Wedung) menjadi salah satu isu penting dalam rangka pembangunan daerah.

Pengembangan kawasan strategis tersebut, selain dapat mendorong bangkitan aktivitas ekonomi dan sosial juga dalam rangka mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi.

10. Kehidupan demokrasi

Reformasi telah membuka ruang partisipasi bagi publik (*public sphere*) dalam mengekspresikan keinginan, tuntutan, dan hak politiknya. Euforia berdemokrasi dan berpolitik pada saat ini terkadang mengesampingkan kualitas berdemokrasi dan berpolitik itu sendiri. Resonansi perpolitikan nasional telah berdampak terhadap instabilitas di daerah. Oleh karena itu kehidupan demokrasi yang santun, bermartabat dan berakhlak dalam kehidupan bernegara dan berbangsa perlu ditumbuhkembangkan, melalui pendidikan politik masyarakat yang baik.